

**PERAN FLOWER ACEH DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ILDA LATIFA
NIM. 200801031

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2024 M/ 1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ilda Latifa
NIM : 200801031
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Cot Lheue Rheng, 04 Agustus 2002
Alamat : Cot Lheue Rheng, Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus
2024 Menyatakan



ILDA LATIFA

**PERAN FLOWER ACEH DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :



ILDA LATIFA

NIM. 200801031

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/di munaqasyahkan oleh:



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Pembimbing I .



Muntazinur, M.A.

NIP. 198609092014032002

**PERAN FLOWER ACEH DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM POLITIK DI BANDA ACEH**

SKRIPSI

ILDA LATIFA


NIM. 200801031

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 04 Desember 2024
02 Jumadil Akhir 1446 H
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Muntazaur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

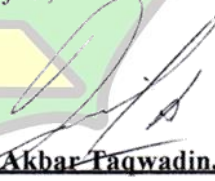
Sekretaris


Lidva, S.IP.

Penguji I,


Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

پنچوڤي II,



Danil Akbar Taqwadin, B.IA., M.Sc
NIP. 198904082023211022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh




DE MUJI MULIA, M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul peran flower aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Banda Aceh, bahwa keterwakilan perempuan di Aceh masih minim, dan memiliki hambatan yang cukup berat untuk terlibat dalam politik. Sehingga Flower Aceh terdorong untuk menjalankan perannya. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, dan apa yang menjadi hambatan Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumentasi untuk menganalisis data dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik karena banyaknya faktor dalam masyarakat, dan Flower Aceh memberikan penguatan-penguatan kepada perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melakukan dengan menjalankan empat peranan yaitu, peran pendampingan, peran pendidikan/training, dan yang terakhir peran advokasi. Tetapi tetap memiliki beberapa hambatan diantaranya, budaya patriaki, kurangnya kesadaran, serta kurangnya dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci : *Flower Aceh, Keterwakilan perempuan, Politik*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang sudah memberikan segala nikmat dan karunia serta petunjuk-Nya sepanjang perjalanan akademik ini. Shalawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

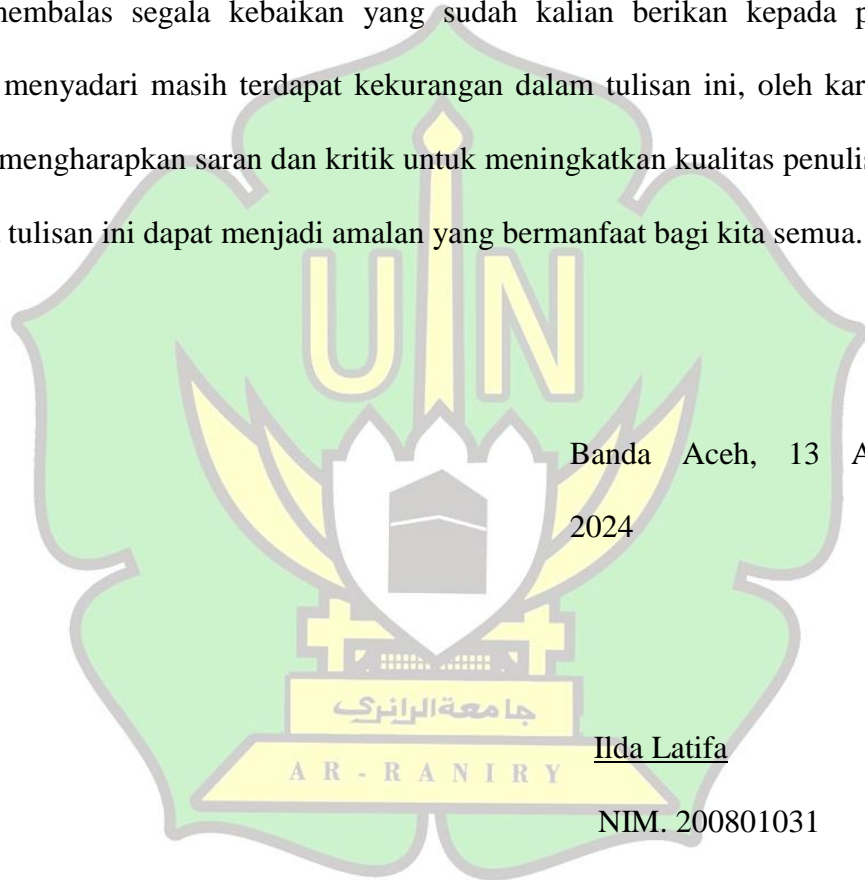
Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kota Banda Aceh*”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dan pemerolehan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Maka dalam hal ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Prof. Dr H. Mujiburrahman, MAg, selaku rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik.
4. Penasehat Akademik Dr. Ernita Dewi, S.AG., M.Hum dan seluruh Bapak dan Ibu dosen di lingkungan FISIP yang sudah tulus dan ikhlas. memberikan ilmunya kepada penulis selama ini serta seluruh staf FISIP UIN Ar-Raniry.

5. Ibu Mumtazinur, M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kepada Ayahanda Ilyas Sulaiman dan Ibunda Dahniar yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta cinta kasih tanpa syarat. Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara/i tercinta Kakak Nopi Apriani dan Abang Irfan. Serta seluruh keluarga besar penulis.
7. Kepada informan penelitian di LSM Flower Aceh serta narasumber yang telah memberikan data-data dan gagasan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Kepada keluarga besar ccs yang telah menemani penulis dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya, baik yang berada di bangku perkuliahan maupun di luar bangku perkuliahan, yang telah memberikan dukungan tanpa henti selama proses penulisan skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya dengan penuh rasa syukur dan cinta saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada syukur haldi wijaya atas dukungan dan bantuan yang luar biasa penting dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kehadirannya dan dorongannya yang senantiasa menemani di setiap langkah.

Dengan doa dan usaha serta dukungan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis merasa tidak mampu membalas semua bantuan yang sudah diberikan oleh keluarga, Bapak/ Ibu, dan teman-teman. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang sudah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk meningkatkan kualitas penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita semua.



Banda Aceh, 13 Agustus
2024

Ilda Latifa

NIM. 200801031

DAFTAR ISI

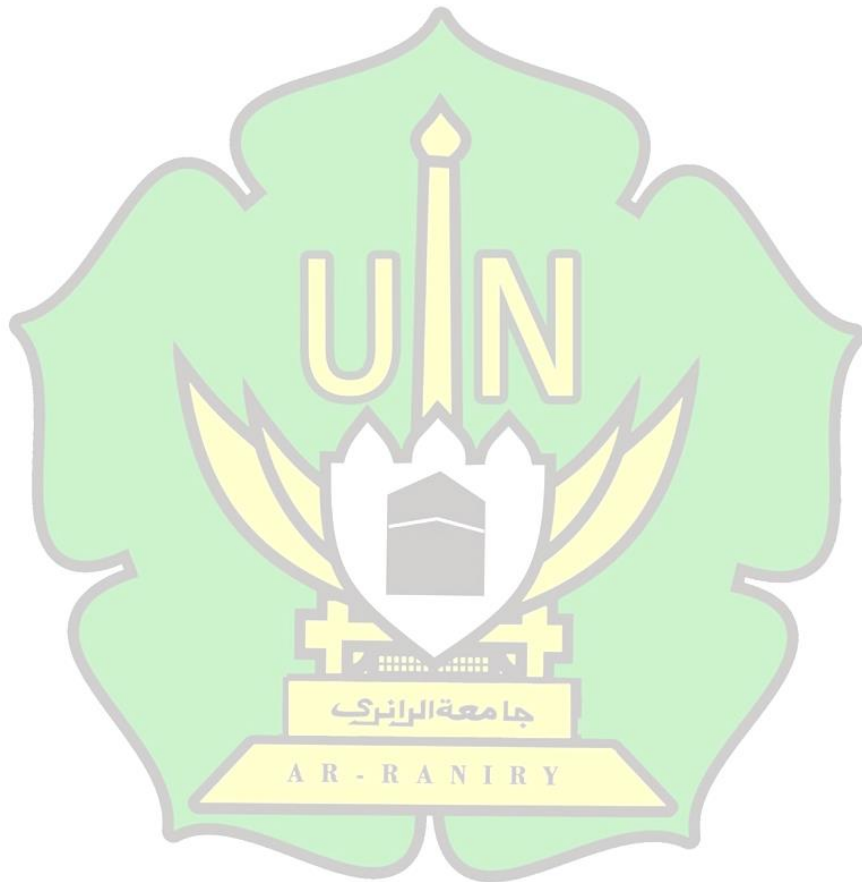
LEMBARAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konsep.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Pendekatan Penelitian	23
3.2 Fokus Penelitian	23

3.3 Lokus Penelitian	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Flower Aceh.....	27
4.2 Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.....	34
4.3 Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Flower Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.....	50
BAB VI PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 1.2 Daftar Nama Direktur Flower Aceh.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Flower Aceh31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian	62
Lampiran 2. Surat Penelitian	63
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perempuan Aceh memiliki tantangan yang cukup berat untuk terlibat dalam kegiatan politik perempuan di Aceh tidak serta merta dapat terpenuhi hak politiknya, Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang melatar belakanginya Pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat perempuan. Kedua, kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh perempuan baik material maupun non- material. Ketiga, adanya gap dan tujuan yang berbeda di antara organisasi perempuan. Ketiga faktor tersebut harus diperkuat manakala perempuan akan maju menjadi anggota Parlemen, tidak hanya sekadar memenuhi kuota yang ada, akan tetapi kebijakan yang dihasilkan ke depan diharapkan memiliki kontribusi positif bagi komunitas.¹

Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Aceh setiap tahunnya mengalami naik turun seperti yang kita ketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPRA pada tahun 2014-2019 jumlah kursi yang diisi mencapai 12 orang perempuan yang mewakili di lembaga politik. Pada tahun 2019-2024 menurun menjadi 9 kursi untuk perempuan yang menjabat dilembaga politik. Sejauh ini banyak kendala yang menjadikan keterwakilan perempuan dilembaga minim,

¹ Puspitasari, T. F. (2018). Gerakan Affirmasi Untuk Kesetaraan: Kuota 30%, Peran DPIA dan Representasi Perempuan Aceh di Parlemen. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 141-151.

salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat Aceh yang tidak paham akan politik.²

Terdapat mekanisme pemenuhan kuota 30% bagi perempuan di parlemen saat ini gagasan ini tertuang dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 177 huruf d tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit sebanyak 30 persen tentang pemilihan umum mengatakan bahwa setidaknya terdapat satu orang kandidat perempuan diantara 3 orang kandidat laki-laki dengan nomor urut zig-zag atau yang disebut dengan penentuan nomor urut. Akan tetapi pada praktiknya dilapangan undang-undang ini tidak dipatuhi, sistem nomor urut zig-zag tidak digunakan dan perempuan seringkali mendapatkan nomor urut terakhir menjadi nomor 3 dan 6 dalam kertas suara. Hal ini terjadi karena ketiadaan sanksi yang jelas bagi partai politik yang tidak mau mengikuti sistem zig-zag tersebut sehingga tetap saja perempuan kurang diuntungkan pada posisi ini.³

Saat ini, Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh sudah membuka ruang bagi perempuan untuk maju menjadi anggota legislatif. dan Undang-undang pemilu No. 7 tahun 2017 Secara tegas mewajibkan partai politik untuk menyediakan 1 kandidat perempuan dari tiga orang kandidat laki-laki, sedangkan Qanun hanya “memperhatikan” kehadiran perempuan di parlemen sehingga tidak wajib bagi partai politik Aceh untuk memenuhi kekosongan perempuan di Parlemen, Qanun Aceh terlihat kurang welcome terhadap kehadiran

² Perdana, R. A. (2019). *Eksistensi calon perseorangan dalam pemilukada di Indonesia* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

³ Ekawati, E. (2015). *Penerapan Kebijakan Afirmasi Dan Pola Rekrutemen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2009*. Jurnal Polinter:Kajian Politik Dan Hubungan Internasional, 1(1), Hlm 61-83.

perempuan dalam politik, Karena adanya ketimpangan ini, peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Flower Aceh, sangat diperlukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.⁴

Flower Aceh adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengkonsentrasikan dari pada pemberdayaan perempuan yang berspektif gender. Sistem tatanan masyarakat di aceh dan masyarakat umum dewasa ini ditandai adanya ketimpangan gender dalam berbagai segi kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dari segi politik telah terjadi perampasan hak perempuan secara sistematis sehingga perempuan terpinggirkan dari ranah kekuasaan politik dan kesadaran kritisnya. Pelanggaran juga terjadi pada hak-hak perempuan lainnya sebagai akibat tidak adanya sistem dan peraturan pemerintah serta hukum yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan.⁵

Lembaga Flower Aceh ini bertujuan mewujudkan suatu tatanan sosial yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan demokratis, serta berwawasan lingkungan, kesamaan dan kebersamaan, kemandirian, keterbukaan dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut flower aceh melakukan usaha-usaha pemberdayaan perempuan agar memiliki kekuasaan politik yaitu akses dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan mereka. Selain itu, juga kekuatan sosial yaitu akses dan partisipasi

⁴ Puspitasari, T. F. (2018). Gerakan Affirmasi Untuk Kesetaraan: Kuota 30%, Peran DPIA dan Representasi Perempuan Aceh di Parlemen. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), Hlm 141-151.

⁵ Aulia, T. F. (2023). *Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

dalam proses pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan mereka. Demikian pula rasa aman dari tekanan dan pengaruh kekuatan-kekuatan budaya patriarki dan kekuasaan negara.⁶

LSM ini memiliki pandangan bahwa untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan tatanan sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan. Pandangan tersebut yang kemudian menjadi tujuan flower Aceh (1) memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak dasar perempuan marginal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya (2) memperkuat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerahnya (3) mengembangkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan (4) mengembangkan data base kasus kekerasan terhadap perempuan (5) melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan (6) memperkuat kapasitas organisasi perempuan dan kelembagaan Flower Aceh (7) berkerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan.⁷

Lembaga Flower Aceh dalam menjalankan perannya sebagai lembaga masyarakat yang fokus perhatiannya terhadap permasalahan pada kaum perempuan, membentuk suatu kelompok dampingan perempuan. Di bentuknya

⁶ Rinaldi, F. (2023). *Gerakan Perempuan dan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019)* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

⁷ Mahbengini, T. (2022). *Pola Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh Dalam Konstruksi Gender Pada Masyarakat Aceh* (UIN Ar-Raniry).

kelompok dampingan bagi perempuan oleh flower adalah agar perempuan dapat terkumpul dalam suatu sehingga oleh lembaga flower dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian pendampingan yang dilakukan oleh lembaga flower bertujuan agar perempuan mendapatkan penguatan-penguatan sehingga mereka dapat mengembangkan dirinya sendiri dan dapat lebih berdaya.

Dalam kajian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu pada Flower Aceh. Penelitian merasa tertarik pada Flower Aceh yang memiliki sistem dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik maupun pemerintahan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik serta hambatan Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan dalam politik di Banda Aceh?
2. Apa Hambatan Flower Aceh dalam meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam politik di Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai atau diharapkan dari sebuah penelitian, sehingga merupakan lanjutan dari identifikasi masalah. Umumnya menyangkut keinginan untuk memaparkan (*to dispose*) dan menjelaskan (*to explain*) dari apa yang dinyatakan dalam identifikasi

masalah, sehingga tetap konsisten dengan identifikasi kepada panduan-panduan di atas, maka perumusannya akan seperti berikut.

1. Untuk menganalisis bagaimana Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis apa hambatan Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian adalah upaya untuk menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan, baik manfaat teoritis dari segi keilmuan maupun manfaat praktis hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna untuk melatih cara berpikir secara sistematis dalam meneliti dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Begitu pula penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang “Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Banda Aceh”

1. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian ilmu politik, khususnya penelitian dalam kehidupan masyarakat. Saya berharap dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan atau sejenisnya.

2. Secara praktis: Penelitian diharapkan mampu menjadi masukan dan wawasan bagi masyarakat terhadap Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun dari penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Puji Astuti (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “peran lembaga swadaya masyarakat (lsm) koalisi perempuan indonesia (kpi) kota semarang dalam pemberdayaan politik perempuan di kota semarang”. Peran Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Semarang secara keseluruhan masih terbilang kurang. Peran mereka belum bisa mendominasi maupun setara dengan peran laki-laki. Peran KPI Kota Semarang untuk membuat kemandirian perempuan masih belum bisa menonjol dikarenakan kurang aktifnya KPI mensosialisaikan kegiatannya, terutama pada bidang politik. Kurang berkembangnya KPI wilayah Semarang juga dikarenakan banyaknya perempuan kota semarang yang tidak peduli dan tidak ingin bergabung ke KPI.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa kegiatan tentang pemberdayaan perempuan dalam dunia politik sangatlah minim. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan KPI Kota Semarang terkait pemberdayaan perempuan dalam bidang politik kurang berhasil dikarenakan kurang adanya partisipasi dari para perempuan Kota Semarang yang tertarik dalam dunia politik serta untuk menjadi

anggota legislatif. Dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan sosialisasi tentang pemberdayaan politik untuk perempuan Semarang masih bersifat pasif. Hal ini diperkuat atas hasil wawancara yang menyatakan bahwa dalam setiap rapat dan sosialisasi perempuan hanya sekedar hadir dan mendengarkan jalannya kegiatan. Mereka tidak berani mengusulkan pendapat ataupun menentang kebijakan yang telah dikeluarkan. Adapun perbedaan penelitiannya adalah yaitu lokasi penelitian, dan penelitian ini lebih fokus pada pemberdayaan melalui sosialisasi sedangkan yang diteliti oleh penulis lebih menekankan pada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini berfokus pada KPI di Semarang sedangkan penelitian penulis tentang Flower Aceh di Aceh. Dan persamaan penelitiannya adalah sama-sama fokus pada Pemberdayaan perempuan dalam politik.⁸

Penelitian Iqbal Gustian dan Eka Vidya Putra (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “perspektif aktivis perempuan LSM terhadap keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat” Perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen sampai saat ini masih mengalami banyak hambatan. Namun beragam upaya masih terus dilakukan agar terciptanya kebijakan yang pro perempuan supaya permasalahan perempuan selama ini dapat teratasi. Pada bahasan ini peneliti akan membahas beberapa hal mengenai keterwakilan perempuan di parlemen, Keterwakilan perempuan di parlemen pada daerah pemilihan Sumatera Barat di Pemilu tahun 2019 ini secara jumlah mengalami peningkatan yang signifikan dan menunjukkan angka

⁸ Astuti, P. (2015). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), Hlm 151-160.

tertinggi dibanding Pemilu sebelumnya. Namun peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas belum sesuai dengan harapan. Aktivis menginginkan adanya peningkatan dari sisi jumlah dan kualitas. Aktivis perempuan kurang yakin mereka yang duduk di parlemen mampu membuat regulasi dan terobosan yang lebih berpihak pada perempuan. Namun aktivis perempuan punya harapan besar agar mereka mampu membuat banyak hal untuk menciptakan kesejahteraan pada perempuan.

Menurut pandangan aktivis, keterwakilan perempuan di parlemen belum sesuai harapan di sebabkan karena beberapa faktor penghambat yaitu budaya Budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghambat keterwakilan perempuan di parlemen. Budaya patriarki yang ada di masyarakat, keluarga dan kelembagaan partai politik jadi hambatan bagi perempuan untuk bisa lolos di parlemen. Sistem politik di Indonesia dengan biaya politik yang mahal dan rekrutmen politik yang belum berpihak pada perempuan menjadi salah satu penyebab masalah keterwakilan perempuan di parlemen dari sisi jumlah masih sedikit. Kualitas Pemilih Faktor penghambat perempuan lolos ke parlemen terletak pada kualitas pemilih yang masih rendah. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih masih rendah. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi pemerintah yang masih belum maksimal. Faktor lainya seperti money politik, kedekatan dengan caleg dan kecerdasan pemilih dalam memilih anggota parlemen. Partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan penentu kemajuan suatu bangsa. Melalui pemilih yang berkualitas akan terpilih calon yang berkualitas. Adapun perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini lebih

fokus pada keterwakilan perempuan di parlemen Sumatera Barat, sedangkan yang diteliti oleh penulis lebih fokus pada peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Aceh. Persamaan penelitiannya adalah Kedua penelitian ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya dalam peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik.⁹

Penelitian Iga Purnamasari (2019) dalam penelitiannya “Peran LSM Mitra Wacana WRC (Woman Resource Center) Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Di Desa Hargorejo, Kokap Kulonprogo)”. Mitra Wacana merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang layanan informasi dan pendidikan perempuan. Kontribusinya dalam meningkatkan pendidikan perempuan tidak dibertanyakan lagi. Ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan dari pemerintah maupun NGO lainnya untuk tetap konsisten bekerjasama dengan Mitra Wacana.

Peran LSM Mitra Wacana dalam pemberdayaan perempuan di Desa Hargorejo sangat berpengaruh untuk memperluas ruang gerak perempuan di masyarakat yaitu ikut serta dalam pembangunan Desa selain untuk melatih kemandirian. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi oleh anggota P3A Sekar Melati sebagai perwakilan untuk menyuarakan atau memperjuangkan hak perempuan yang harus diketahui semua masyarakat. Jadi anggota P3A Sekar Melati yang dibentuk oleh Mitra Wacana mampu mempraktikkan pembelajaran dan pelatihan dalam kelompok yaitu public speaking. Selain itu banyaknya pelatihan yang membuat perempuan semakin mandiri adalah pembuatan proposal yang sudah tembus ke disnakertrans dan usaha catering, pelatihan masak dan

⁹ Gustian, I., & Putra, E. V. (2020). Perspektif Aktivis Perempuan LSM terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 166-173.

pembuatan ketrampilan, pengelolaan administrasi kelompok, terbentuknya TBM (Taman Baca Masyarakat) di Setiap Desa dan pastinya penguatan informasi tentang isu perempuan. Jadi pelatihan yang diberikan oleh Mitra Wacana merupakan pilihan bagi anggota untuk menindaklanjuti atau tidak, karena ini salah satu cara agar dapat membangun sikap kritis masyarakat sehingga mampu mandiri. Adapun perbedaan penelitiannya adalah peneliti ini berfokus pada peran LSM Mitra Wacana WRC dalam pemberdayaan perempuan di Desa Hargorejo, Kulonprogo, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah berfokus pada peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Aceh. Dan penelitian ini lebih menekankan pada pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, kemandirian, dan pelatihan keterampilan, sementara yang diteliti oleh penulis berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam konteks politik. Persamaan penelitiannya adalah Kedua penelitian ini fokus pada pemberdayaan perempuan melalui peran lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁰

Berdasarkan penelitian di atas, tidak ada persamaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu hanya saja terdapat persamaan semua penelitian melihat peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan perempuan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian ini yaitu pada peran flower aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana flower aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan

¹⁰ Purnamasari, I. (2019). *Peran Lsm Mitra Wacana Wrc (Woman Resource Center) Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Di Desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo)* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

dalam politik. Adapun persamaan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2.2 Landasan Konsep

Landasan konsep merupakan gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar. Landasan konseptual ini sebagai strategi dalam pelaksanaan penelitian dan sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam suatu proposal penelitian harus digunakan bahasa yang efektif bersifat singkat dan padat, namun intinya telah dapat dipahami, dan benar-benar memberikan tuntunan pada penelitian yang akan dilakukan dan dianggap relevan.¹¹

2.2.1 Konsep *Civil Society*

konsep masyarakat sipil memiliki akar sejarah yang panjang dalam perkembangan masyarakat Barat. Jejak awalnya dapat ditemukan sejak era Cicero (106–43 SM) dan bahkan lebih jauh ke zaman Aristoteles (384–322 SM). Istilah *civil society* pertama kali diperkenalkan oleh Cicero dalam pemikiran politiknya. Pada masa itu, *civil society* dipahami sebagai sinonim dari negara (*the state*), yang diartikan sebagai sebuah komunitas yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan komunitas-komunitas lain.¹²

Perkembangan *civil society* dalam konteks yang modern pertama kali dipakai oleh Hegel dalam *Philosophy of Right* pada tahun 1821. Dia menyebutkan

¹¹ Machali, I. (2021). Metode penelitian kuantitatif (panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif).

¹² Sutrisnowati, V. F. S. A. (2013). *Civil Society, Konsep Ummah dan Masyarakat Madani*. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 13(1).

bahwa " Masyarakat sipil adalah lingkungan hidup yang beretika terletak antara keluarga dan negara".

Lebih lanjut, Hegel menjelaskan bahwa negara merupakan representasi dari ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan mempunyai hak penuh untuk melakukan intervensi terhadap *civil society*. Dari pandangan ini, maka intervensi negara terhadap wilayah *civil society* tidaklah dianggap sebagai tindakan ilegal (melanggar hukum) mengingat posisi negara sebagai pemilik ide universal dan hanya pada level negaralah politik bisa berlangsung secara murni dan utuh.¹³

Lain halnya dengan perspektif Hegelian, menurut Adi Suryadi Culla hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan ditekankan justru terletak pada basis gerakan masyarakat sipil atau *civil society* sebagai aktor utama; bagaimana reaksi masyarakat sipil terhadap negara yang cenderung mendominasi dan mengintervensi masyarakat sipil serta mengapa masyarakat sipil mampu mempertahankan sikap kritis dan otonom, baik terhadap campur tangan negara maupun masyarakat politik dan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan *civil society* disini adalah entitas sosial-politik yang menjejantah dalam berbagai jaringan dan pengelompokan sosial mulai dari rumah tangga (*household*), organisasi sukarela seperti Ornop atau LSM, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan lain sebagainya yang dibentuk oleh masyarakat.¹⁴

¹³ Aziz, A. (2005). *Learning society sebagai upaya mewujudkan civil society: Telaah atas konsep civil society and learning society* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

¹⁴ Jb, M., & Darmawan, L. (2016). Wacana Civil Society (Masyarkat Madani) Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35-64.

Selanjutnya, Han Sung-joo mengatakan “bahwa *civil society* merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *civil society* ini”.¹⁵

Lebih lanjut, Perez-Diaz menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, sehingga munculnya keinginan adanya kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang. Disamping itu, ada pula pandangan dari Christopher Bryant “*civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian”.¹⁶

Demikian pula pemikiran dari Hikam yang mengartikan *civil society* adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara, yang terikat oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian pandangan ini pada hakekatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang mempunyai kemandirian dan terbebas dari hegemoni negara.¹⁷

¹⁵ Lopian, L. G. (2012). *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁶ Solihah, R., & IP, S. (2019). *Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah. Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Hlm 63.

¹⁷ Lutfi, M., & Satriawan, M. I. (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Universitas Brawijaya Press.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai definisi *civil society* di atas, dapat dikatakan bahwa *civil society* merupakan suatu space atau ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain, dan dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Asosiasi tersebut bisa dalam bentuk bermacam-macam, seperti kalangan bisnis, koperasi ikatan profesi, LSM, dan lain sebagainya, hubungannya dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

Dikatakan oleh Michael Walker, "bahwa orang-orang secara bebas berasosiasi dan berkomunikasi dengan satu sama lain, membentuk dan memperbaharui semua kelompok dari berbagai macam jenis, bukan untuk kebaikan kelompok tertentu keluarga, suku, agama, kalangan yang hidup bersama tapi untuk kebaikan hubungan sosial itu sendiri. Untuk kita dengan sifat alami sosial, sebelum kita menjadi manusia politik atau pun ekonomi".¹⁸

Setelah membahas beberapa pengertian *civil society*, menurut Einstadt *civil society* memiliki empat komponen sebagai syarat yaitu:¹⁹

1. Otonomi, yaitu kemandirian dalam melakukan inisiatif untuk melakukan kegiatan dan kemandirian dari intervensi negara yang tidak seharusnya dilakukan. Semua kekuatan politik yang ada dapat dengan leluasa melakukan apa yang disebut sebagai rekrutmen politik.

¹⁸ Hikam, M. A. (2000). *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Erlangga.

¹⁹ Syakuro, A. (2018). *Partisipasi civil society dalam pembentukan peraturan daerah (studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang izin lingkungan)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

2. Akses masyarakat terhadap lembaga negara, artinya individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuk, dan pemerintah harus memberikan komitmennya untuk mendengar, menerima keluhan dan aspirasi warganya, dan diteruskan dengan mengambil sejumlah langkah-langkah konkret untuk keperluan itu.
3. Arena publik yang otonom, adalah suatu ruang tempat warga negara untuk mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan. Arena publik ini pada prinsipnya terlepas dari campur tangan negara.
4. Arena publik yang terbuka, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia, eksklusif, dan setting yang bersifat korporatif. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya, bahkan ikut terlibat di dalamnya.

Disamping itu, *civil society* dalam kehidupan masyarakat juga memainkan perannya. Peran *civil society* sebagai hal utama dalam mencipta dan melahirkan perubahan sosial dan politik adalah dalam pemberdayaan. Menurut Arif Budiman, proses pemberdayaan akan berlangsung jika, pertama, kelompok masyarakat sipil mendapat peluang untuk lebih banyak berperan, baik di tingkat negara maupun masyarakat; kedua, bila posisi kelas tertindas berhadapan dengan kelas dominan menjadi lebih kuat, berarti juga terjadinya proses pembebasan rakyat dari kemiskinan dan ketidakadilan.²⁰

²⁰ Purnawibawa, M. A. (2004). Penguatan Masyarakat Sipil (Civil Society) Di Jakarta.

Hal yang serupa mengenai pemberdayaan juga diungkapkan oleh Hadiwijoyo, bahwa dalam proses demokrasi, masyarakat diberikan peranan yang luas untuk ikut aktif berpartisipasi dalam negara dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam negara dan pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kemampuannya. Hal tersebut adalah salah satu esensi dari *civil society*.²¹

Dalam mewujudkan *civil society* dalam suatu negara, salah satu asosiasi dari *civil society* yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang disingkat dengan LSM memainkan peranannya dalam proses pembangunan sebuah negara. Menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna, mengidentifikasi empat peranan yang dapat dimainkan oleh kalangan LSM agar terwujudnya *civil society* dalam sebuah negara antara lain.²²

1. Katalisasi Perubahan Sistem

Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijakan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.

²¹ Fariz, M. *Civil Society Dan Demokrasi Studi Peran Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Penguatan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

²² Praja, A. N. (2009). *Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di kabupaten grobogan* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang).

2. Memonitor Dalam kehidupan pemerintahan daerah, dari empat peranan yang dapat dimainkan oleh LSM menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna dapat diidentifikasikan peranan yang dijalankan LSM-LSM Grobogan yaitu: katalisasi perubahan system, memonitor pelaksanaan system dan penyelenggaraan Negara, memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan lembaga peradilan dan yang terakhir adalah implementasi program pelayanan.⁷⁶ Keempat peranan ini dilaksanakan dalam berbagai aksi dan kegiatan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Katalisasi perubahan system dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah penting dalam masyarakat dan melakukan advokasi demi perubahan kebijakan pemerintah. Sedangkan implementasi program pelayanan dilakukan melalui sejumlah pelaksanaan kegiatan dan program dibidang pendidikan dan kesehatan serta proyek-proyek pemberdayaan masyarakat

Memonitor pelaksanaan system dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara.

3. Memfasilitasi Rekonsiliasi Warga Negara Dengan Lembaga Peradilan

Hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan, dan kalangan LSM muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.

4. Implementasi Program Pelayanan

LSM dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat. Selanjutnya, juga diungkapkan oleh Muhammad AS Hikam, bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan masyarakat *civil* yang dilakukan melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.²³

Dapat dikatakan *civil society* adalah suatu kelompok masyarakat yang berkumpul secara suka rela yang terbebas dari tekanan negara, bersifat swadaya, dan pada hakekatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang mempunyai kemandirian serta suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, dan lain sebagainya. Disamping itu juga terdapat peran yang dilakukan oleh *civil society*, peran tersebut dapat diwujudkan oleh elemen-elemen.²⁴

Konsep *civil society* digunakan untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kelompok perempuan Banda Aceh dan digunakan sebagai sebuah langkah oleh lembaga Flower agar perempuan di Kota Banda Aceh dapat lebih berdaya di ranah perpolitikan dengan menjalankan peranannya sebagai LSM pemerhati perempuan.

Berdasarkan konsep *civil society* dan peranannya, Flower Aceh dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki peran signifikan dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Dalam konteks keterwakilan perempuan, Flower Aceh berfungsi sebagai fasilitator, katalisator,

²³ Praja, A. N. (2009). *Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif civil society di kabupaten grobogan* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang).

dan pengawas dalam memastikan perempuan memiliki akses yang setara ke ruang politik dan pengambilan keputusan di Banda Aceh. Oleh karena itu, peran Flower Aceh sejalan dengan *esensi civil society* yang menekankan pada kemandirian, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem politik yang inklusif.

2.2.2 Konsep Peran

Pengertian Peran menurut Riyadi, peran dapat dimaknai sebagai pandangan dan konsep mengenai posisi yang dijalankan oleh seseorang atau pihak tertentu dalam hubungan sosial. Dengan menjalankan peran tersebut, individu atau organisasi akan bertindak sesuai dengan ekspektasi yang berasal dari orang-orang atau lingkungan sekitarnya.²⁵

Suhardono, menjelaskan bahwa peran diartikan pada karakter yang disandang untuk dimainkan seseorang aktor dalam sebuah panggung drama. Secara sosial peran diartikan sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Menurut Sarwono, menyatakan posisi aktor dalam teater disamakan dengan posisi orang di masyarakat yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam hubungan yang berkaitan dengan aktor tersebut.²⁶

Menurut Biddle dan Thomas, golongan peran terbagi atas: 1. Orang yang melakukan interaksi social, 2. Adanya perilaku yang timbul dalam interaksi social

²⁵ Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).

²⁶ Suwarni, M. (2023). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

terdiri atas: harapan, norma, wujud. 3. Adanya kedudukan orang yang memiliki peran, 4. Memiliki kaitan antara orang dan perannya. differensiasi, konsensus, konflik peran, keseragaman, spesialisasi, konsistensi, ransangan atau hambatan, ganjaran atau hukuman, serta adanya hubungan Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat ahli, dapat di ambil kesimpulan bahwa Peran adalah yang menjelaskan seseorang memiliki peran sesuai dengan kedudukan dan struktur yang mengikat sehingga seseorang harus memainkan sikap atau karakter yang sesuai dengan peran yang di jalankan nya. Jika seseorang yang mendapatkan sebuah peran tidak selalu sesuai dengan tujuan yang ingin di capainya. Kadangkala seseorang tidak menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya sehingga menimbulkan konflik peran. Konflik peran akan menimbulkan efek negatif kepada aktor, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan aktor untuk bertindak sesuai dengan yang tuntutan perannya.²⁷

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soekanto bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Adapun suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:²⁸

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini peranan merupakan

²⁷Putri, C. S., & Jatningsih, O. (2020). Pelaksanaan Peran PKK dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8(3), 887-901.

²⁸Balirante, H. G. (2021). Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2)

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan adalah konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Disamping itu, perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu. Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah.

Dalam penelitian ini, konsep peran dan konsep civil society digunakan untuk menganalisis bagaimana Flower Aceh berperan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Konsep peran digunakan untuk menggambarkan fungsi dan kontribusi Flower Aceh dalam pemberdayaan dan mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, sementara konsep civil society membantu memahami Flower Aceh sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berinteraksi dengan institusi politik dan berjuang untuk hak-hak perempuan. Keduanya saling melengkapi untuk menilai peran LSM ini dalam mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih inklusif bagi perempuan di Aceh.²⁹

²⁹ Putra, D. K. S. (2018). *Political social responsibility: Dinamika komunikasi politik dialogis*. Prenada Media.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Metode ini berfungsi untuk menggambarkan Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Banda Aceh.³⁰

3.2 Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Banda Aceh, di karena Flower Aceh sebagai organisasi yang berperan dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik di Aceh, khususnya di Banda Aceh. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Flower Aceh berperan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, dan mengatasi hambatan.

3.3 Lokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk

³⁰ Sugiono , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, :Alfabeta,2010) Hlm 6

melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan.³¹ Dalam hal ini, lokasi penelitian ini di Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh di kota Banda Aceh, yang mana Aceh memiliki konteks budaya, agama, dan politik yang unik di Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum syariah di Indonesia, Aceh memiliki dinamika politik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ada dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat melalui bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi suatu objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan, laporan hasil kerja serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).³²

b. Wawancara

Referensi lain penulis dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu

³¹ Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

³² Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir)*. Penerbit K-Media.

dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian.

Dalam kata lain wawancara juga merupakan pertemuan antara penulis dengan informan penelitian atau pemberi data, yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk itu jawaban responden menjadi data yang dikembangkan oleh penulis.³³

Penulis melakukan dengan anggota Flower Aceh berjumlah 6 orang terdiri dari 1 Direktur, 3 Staff Flower Aceh, dan 2 caleg perempuan dari partai persatuan yang didukung keterwakilannya oleh Flower aceh .

Tabel 1.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan
1	Riswati	Direktur Eksekutif Flower Aceh
2	Gebrina Rezeki	Sebagai Wakil sekolah Ham Flower
3	Sitty Almatunira	Staff Data Flower Aceh
4	Fatimah Zuhra	Staff Program Flower Aceh
5	Kasmawati	Caleg Perempuan dari partai persatuan pembangunan
6	Faizah	Caleg perempuan dari partai persatuan pembangunan

³³ Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Pusaka Almaida.

c. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaborator nya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, penulis melakukan pengamatan di Aceh. Hasil yang di harapkan dapat mencatat respon dan reaksi anggota Flower Aceh terhadap berbagai kegiatan, strategi, atau inisiatif yang dilakukan oleh Flower. Ini dapat membantu memahami persepsi dan pengalaman mereka.

3.5 Teknit Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan permasalahan yang ditentukan.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Flower Aceh

4.1.1 Sejarah Flower Aceh

Flower Aceh merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan perempuan yang berspektif gender, Flower Aceh sudah berdiri kurang lebih selama 35 tahun Didirikan pada tanggal 23 september 1989 oleh Suraiya Kamaruzzaman dan kawan-kawan sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum perempuan Aceh. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur Flower Aceh ibu Riswasti di ruang kerjanya pada hari Senin, 01 Juli 2024. Ia menjelaskan bahwa Flower Aceh lahir karena banyak sekali persoalan serta permasalahan yang dialami kaum perempuan di Aceh.

“Flower Aceh terbentuk karena melihat banyak sekali persoalan serta permasalahan yang kerap dialami perempuan Aceh, saat itu pendiri Flower Aceh yaitu Suraiya dan kawan-kawan membentuk Flower Aceh sebagai upaya untuk memperkuat hak-hak perempuan karena ketimpangan gender”.³⁴

Pada mulanya Flower Aceh bergerak dan menjalankan kegiatan mereka hanya di desa-desa sekitar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh saja dengan alokasi dana uang pribadi tanpa bantuan dari pihak manapun, setelah 7 tahun berjalan Flower Aceh mulai masuk ke desa-desa rawan konflik Daerah Operasi Militer (DOM) seperti Pidie dan Aceh Utara, untuk melakukan kegiatan pemberdayaan serta pendampingan, tidak berhenti disitu Flower Aceh pun

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Riswasti, sebagai Direktur Eksekutif Flower Aceh, pada tanggal 01 Juli 2024, di kantor Flower Aceh.

melakukan pelatihan trauma healing di berbagai daerah, yaitu di Kabupaten Pidie, Bireuen dan Aceh Besar, kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dengan alasan pelatihan ternak bebek sembari memberi pengetahuan kepada perempuan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dasar dan strategi membangun organisasi.³⁵

Bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 membawa pengaruh besar bagi perjalanan program Flower Aceh. Pada saat itu, organisasi dituntut harus mampu bergerak cepat dalam melakukan program penanganan emergency terhadap korban tsunami. Flower Aceh dipercaya oleh banyak lembaga dana dari luar negeri untuk mengelola dana dan sumbangan yang cukup besar untuk membantu pemulihan kehidupan perempuan dan keluarga korban bencana.

Pada tanggal 31 Januari 2009, Flower Aceh mengubah bentuk organisasi dari badan hukum Yayasan menjadi Perkumpulan. Perubahan ini atas inisiatif Pendiri mengubah organisasi dari yayaysan ke perkumpulan sesuai Anggaran Dasar Perkumpulan. Badan Hukum Perkumpulan dianggap lebih sesuai dengan konteks LSM yang memungkinkan LSM dapat dikelola dengan lebih demokrtais. Pada Musyawarah Besar (Mubes) ke II tahun 2008 tercatat ada sebanyak 20 orang (16 perempuan, 4 laki- laki) anggota perkumpulan yang terdiri dari aktivis perempuan, akademisi, ulama dan masyarakat akar rumput.³⁶

³⁵ Mahbengini, T. (2022). *Pola Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh Dalam Konstruksi Gender Pada Masyarakat Aceh* (UIN Ar-Raniry).

³⁶Intan Julia, *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekekrasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, Hlm 22.

4.1.2 Struktur Organisasi Flower Aceh

Tabel 1.2

Daftar Nama Direktur Eksekutif Flower Aceh

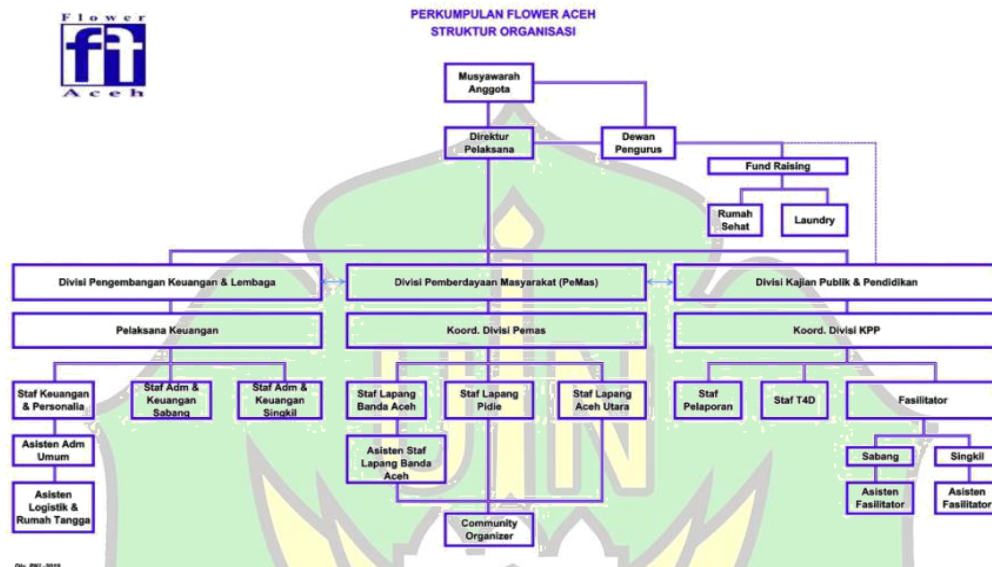
NO	NAMA DIREKTUR	PERIODE	KETERANGAN
1	Hijriati	1989-1994	Satu Periode
2	Hidayati	1994-1995	Pejabat Sementara
3	Suraiya Kamaruzzaman	1995-2002	Dua Periode
4	Suka Mardhiah, Seri Rahayu, Elvida	2002-2003	Kepemimpinan Kolektif
5	Elvida	2004-2006	Mengundurkan Diri
6	Erwin Setiawan	2006-2008	Pejabat Sementara
7	Desy Setiawan	2009-2017	Dua Periode
8	Riswati	2018-sekarang	Saat ini menjabat DE Flower Aceh

Sumber dari: <https://www.slideshare.net/walhiaceh/profil-flower-aceh>

Pimpinan Eksekutif dipilih untuk masa kerja 4 tahun dan hanya dapat dipilih sebanyak dua kali berturut-turut. Direktur Eksekutif dipilih dari Anggota Perkumpulan dengan persyaratan orang tersebut sudah bekerja di Flower Aceh minimal 3 tahun, pernah menjadi Manager Program minimal 1 tahun, mampu membuat laporan serta membaca laporan keuangan. Proses pemilihan dilakukan secara berjenjang melalui penjaringan informal ditingkat wilayah lalu calon diajukan pada rapat Mubes untuk dipilih dan ditetapkan.

Gambar 1.1

Perkumpulan Flower Aceh Struktur Organisasi



Diakses dari sumber: <https://www.floweraceh.or.id/struktur/publikasi/>

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Flower Aceh berpegang pada sejumlah nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Demokrasi

Setiap proses-proses pengambilan keputusan organisasi dibangun secara partisipatif. Keputusan-keputusan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam upaya Flower Aceh berkontribusi untuk memperkuat gerakan penegakan hak-hak perempuan.

2. Anti Kekerasan dan Diskriminasi

Menolak dan melakukan upaya-upaya penghapusan terhadap segala bentuk dan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

3. Kesetaraan

pola relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

4. Keadilan

perlakuan yang adil dalam lingkup internal dan eksternal organisasi. Dari sisi internal perlakuan yang diberikan lembaga tidak membeda-bedakan antar staf dan anggota. Dari sisi eksternal selalu bersikap adil terhadap masyarakat atau kelompok dilingkungannya dengan tidak membeda-bedakan atas jenis kelamin, suku, ras dan agama.

5. Menghargai Keragaman

Menghargai perbedaan yang ada di masyarakat dalam berbagai bidang baik suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya dan pilihan politik.

Dalam kelembagaan, Flower Aceh memiliki tiga divisi untuk melakukan kegiatan-kegiatan mewujudkan visi dan misi diantaranya:

1. Divisi Pemberdayaan Masyarakat

Divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan penguatan kepada masyarakat dengan membuat jadwal serta Menyusun pertemuan kelompok, memberikan pendidikan kritis agar masyarakat mampu menentukan sikap serta pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka.

2. Divisi Kajian, Pendidikan dan Publikasi

Divisi Kajian dan Pendidikan Publik mempunyai 2 bagian yaitu bagian Induk (Informasi dan Dokumentasi) dan bagian kampanye. Pada bagian induk memberikan informasi-informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dialami

perempuan melalui penerbitan newsletter, buku serta informasi dengan email dan juga membuat database terkait kelembagaan serta pengelolaan pustaka. Selanjutnya pada bagian kampanye melakukan investigasi terkait kasus-kasus yang kerap terjadi pada perempuan, seperti kekerasan, stereotip masyarakat dan lainnya. Juga membuat kebijakan melalui jalur non-litigasi dengan melakukan berbagai kegiatan seperti, kajian-kajian serta diskusi mengenai persoalan perempuan.

3. Divisi Pengembangan Keuangan dan Lembaga

Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan diharuskan membuat rancangan pengembangan terkait kualitas SDM para staf melalui magang serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.³⁷

Fungsi Flower Aceh dalam menjalankan perannya dengan langkah strategi yang mendalam dan berkelanjutan adalah:

1. Memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak dasar perempuan marginal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan sosial budaya.
2. Memperkuat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerahnya.
3. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan.
4. Mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database lain terkait kelembagaan.

³⁷ Profile Flower Aceh, wilayah Kota Banda Aceh. <https://www.floweraceh.or.id/profil/>

5. Melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan.
6. Memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan Flower Aceh.
7. Bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai dari tingkat lokal, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia (PKBI), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) dan lainnya, kemudian nasional seperti United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan lainnya, serta internasional seperti Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), nasional dan internasional untuk memajukan, membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan.³⁸

4.2 Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Untuk mewujudkan *civil society* di tengah-tengah masyarakat dalam hal meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, penguatan-penguatan terhadap eksistensi perempuan sangat diperlukan. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh lembaga Flower dengan memberikan penguatan-penguatan pada kelompok perempuan, sehingga perempuan dapat lebih berdaya. Penguatan terhadap eksistensi perempuan dalam bidang politik yang dilakukan oleh Flower berupa penguatan dari segi pendidikan,

³⁸ intan Julia, *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekekrasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, Hal 24.

training/pelatihan, advokasi, penyadaran akan hak-haknya, serta dukungan terhadap kelompok perempuan.

Dalam melihat peran yang dilakukan oleh lembaga Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan melakukan penguatan-penguatan pada kelompok perempuan, kita dapat menganalisisnya dari pendapat yang dikemukakan oleh Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna mengidentifikasi empat peranan yang dapat dimainkan oleh kalangan LSM agar terwujudnya civil society yang mengarah pada pemberdayaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, yaitu katalisasi perubahan sistem, memonitor, memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan, implementasi program pelayanan. Namun,³⁹ untuk melihat peran lembaga Flower dalam meningkatkan perempuan dalam politik, terdapat dua peranan LSM yang tepat dan dapat dilihat dalam peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yaitu katalisasi perubahan sistem dan implementasi program pelayanan.

Pertama, katalisasi perubahan sistem, yang berarti LSM bertugas sebagai suatu kelompok yang mengangkat permasalahan dalam masyarakat, yang kemudian melakukan advokasi-advokasi, mengembangkan kemauan politik rakyat sehingga rakyat menggunakan hak politiknya, serta membentuk sebuah kesadaran terhadap masyarakat yang dapat mendorong inisiatif masyarakat itu sendiri.

³⁹ Stephanus Pelor, S. H. (2018). Peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 131-146.

Berdasarkan hal tersebut, lembaga Flower Aceh menjalankan perannya sebagai LSM pemerhati perempuan dengan mengangkat berbagai permasalahan perempuan yang terjadi khususnya kaum perempuan. Permasalahan yang terjadi pada kelompok perempuan seperti kurangnya kesadaran perempuan untuk menggunakan hak politiknya, perempuan masih tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, pendidikan yang kurang, kurangnya kapasitas perempuan, serta belum mampu memberdayakan diri sendiri untuk menentukan apa yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat.⁴⁰

Melihat hal tersebut, ada beberapa strategi untuk penguatan terhadap eksistensi perempuan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar perempuan lebih dan dapat lebih tampil di depan masyarakat umum. Oleh lembaga Flower memberikan pendidikan politik pada perempuan, agar perempuan dapat terlibat dalam demokrasi. Seperti pada setiap pemilu, lembaga ini memberikan penyadaran politik bahwa setiap kita khususnya perempuan harus mengetahui bagaimana agar terlibat dalam demokrasi. Dalam hal menjadi penguatan politik pada perempuan, Flower memberikan dukungan penuh setiap kader perempuan yang ikut mencanangkan diri dan bergabung di dalam lembaga politik lainnya.⁴¹

Kemudian, lembaga ini melakukan advokasi-advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak perempuan dan juga membuka ruang untuk perempuan agar penguatan terhadap eksistensi perempuan di Banda Aceh dapat terwujud dengan

⁴⁰ Misbach, T. R. (2029) Laki-Laki Dan Kesetaraan Gender.

⁴¹ Hasan, K. (2006). Materi Workshop: Gerakan Sosial Baru Dalam Perspektif Global (Realitas New Social Movement In Aceh).

melakukan advokasi-advokasi serta lobi-lobi untuk pemenuhan hak perempuan itu sendiri yang didampingi oleh Flower. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh perempuan dapat terpenuhi dan perempuan dapat lebih berdaya.

Kedua, memonitor, Flower Aceh berperan penting dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk memahami dan terlibat dalam politik. Salah satu perannya adalah dengan memberikan pelatihan, edukasi politik, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun provinsi. Melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh Flower Aceh, perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam kepemimpinan, serta memahami bagaimana cara kerja politik dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, Flower Aceh berperan sebagai jembatan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering menghalangi perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam politik, seperti norma-norma sosial yang menganggap bahwa peran politik lebih dominan bagi laki-laki. Dengan program-program yang mereka jalankan, Flower Aceh berusaha menciptakan sebuah ruang yang inklusif, di mana perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi.⁴²

Namun, keterwakilan perempuan dalam politik di Banda Aceh masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait dengan norma-norma budaya yang kerap membatasi ruang gerak perempuan. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana Flower Aceh berupaya mengatasi tantangan tersebut dan

⁴² Putri, A. (2024). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh Dalam Menyosialisasikan Pencegahan Pernikahan Dini Di Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi).

meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Penelitian ini juga bisa mengeksplorasi peran Flower Aceh dalam mendukung perempuan agar dapat mencapai posisi-posisi yang lebih tinggi dalam politik, seperti menjadi calon legislatif atau berperan dalam pemerintahan. Lebih jauh lagi, skripsi ini akan menggali sejauh mana keberadaan Flower Aceh dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial dan politik di Banda Aceh, dengan meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ketiga, LSM membantu menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan lembaga peradilan, memastikan akses yang adil dan setara bagi perempuan dalam mencari keadilan. Mereka dapat memberikan pendampingan hukum, advokasi, dan edukasi mengenai hak-hak perempuan dalam sistem peradilan. Misalnya, Flower Aceh berperan membangun kesadaran kritis masyarakat, terutama tokoh adat dan agama.⁴³

Keempat, implementasi program pelayanan, dalam hal ini LSM merupakan lembaga pemerhati masyarakat yang melakukan berbagai program dalam masyarakat agar masyarakat dapat lebih berdaya terutama di tingkat *grassroots*. Program-program yang dilaksanakan tergantung kepada kebutuhan masyarakat serta tergantung pada fokus dari LSM tersebut, sehingga program maupun kegiatan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, program-program atau kegiatan-

⁴³ Julia, I. (2020). *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

kegiatan yang dijalankan oleh LSM harusnya dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan dilakukan di kalangan masyarakat yang membutuhkan.⁴⁴

Berdasarkan peranan tersebut, oleh lembaga Flower yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan dalam politik, ada berbagai program atau kegiatan yang tujuannya untuk pemberdayaan dalam keterwakilan perempuan dalam politik. Program-program yang dilakukan oleh Flower untuk meningkatkan eksistensi perempuan dalam bidang politik, sehingga mereka dapat lebih berdaya khususnya dalam dunia perpolitikan. Seperti Flower membentuk kelompok politik perempuan yang salah satu kegiatannya memberikan dan mengembangkan pendidikan informal pada perempuan.

Kemudian, lembaga ini juga melakukan kegiatan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak perempuan. Kegiatan ini melibatkan perempuan secara langsung, namun juga dibantu oleh lembaga Flower Aceh sendiri. Flower Aceh memberikan dan membuka ruang pada masyarakat khususnya perempuan untuk mengadvokasi persoalan mereka sendiri, kemana mereka harus pergi, bagaimaana cara mereka berbicara, apa-apa saja yang mereka harus siapkan, dan siapa saja tim nya. Hal inilah yang dilakukan oleh Flower agar perempuan dapat memberdayakan diri mereka sendiri serta menentukan apa yang mereka harus lakukan.

Berdasarkan peran lembaga Flower dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dalam hal penguatan terhadap eksistensi kelompok perempuan, dengan melihat 4 peranan LSM yang dapat dimainkan oleh kalangan

⁴⁴ Amane, A. P. O., Sos, S., Sihombing, R. S. M., Sip, M. S., Santoso, I., Anny Riwayati, S. E., & Sab, M. S. Dinamika.

LSM agar terwujudnya *civil society* yang mengarah pada keterwakilan perempuan dalam politik.

4.2.1. Peran Pendampingan

Lembaga Flower dalam menjalankan perannya sebagai lembaga masyarakat yang fokus perhatiannya terhadap permasalahan pada kaum perempuan, membentuk suatu kelompok dampingan perempuan di akar rumput. Di bentuknya kelompok dampingan bagi kaum perempuan oleh Flower adalah agar perempuan dapat berkumpul dalam suatu wadah, sehingga oleh lembaga Flower dapat membantu kaum perempuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁴⁵

Pendampingan yang di maksudkan oleh Flower Aceh dalam konteks keterwakilan perempuan dalam politik adalah mengacu pada tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini Flower Aceh berfokus pada memperkuat posisi perempuan dalam politik, memastikan bahwa suara perempuan didengar dan memberikan dampak yang signifikan.⁴⁶

Flower Aceh berperan signifikan dalam memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik melalui berbagai kegiatan pendampingan. Tugas dan tanggung jawab mereka meliputi, Pengembangan Kapasitas, Pendampingan Kampanye, Dukungan Praktis, Mentoring, Dukungan Praktis, Advokasi.

⁴⁵ Data yang diperoleh dari Flower Aceh tentang peran pendampingan bagi perempuan, 2024

⁴⁶ Data yang diperoleh dari Flower Aceh tentang peran pendampingan bagi perempuan, 2024

Dalam konteks keterwakilan perempuan dalam politik Flower Aceh mendampingi berbagai pihak dengan Fokus pada:⁴⁷

1. Perempuan yang Mencalonkan Diri

Flower Aceh memberikan dukungan kepada perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Dukungan ini termasuk pelatihan dalam merancang strategi kampanye, memahami regulasi pemilihan, serta teknik komunikasi yang efektif untuk menjangkau pemilih.

Flower Aceh memberikan pendampingan menyeluruh kepada perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui beberapa tahapan, Pra-Pemilihan Flower Aceh melakukan pelatihan dasar mengenai politik dan strategi kampanye, serta membantu dalam penyusunan rencana kampanye yang menyeluruh.

Selama Kampanye Flower Aceh memberikan bimbingan berkelanjutan selama periode kampanye, menyediakan dukungan praktis dalam mengelola kampanye, serta mengadakan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi calon. Menjelang dan Setelah Pemilihan Flower Aceh menyelenggarakan simulasi dan uji coba menjelang hari pemilihan, memberikan penyuluhan terakhir mengenai manajemen hari pemilihan, serta melakukan evaluasi pasca-pemilihan dan menyediakan dukungan berkelanjutan bagi calon yang terpilih.⁴⁸

⁴⁷ Data yang diperoleh dari Flower Aceh tentang Perempuan yang Mencalonkan Diri, 2024

⁴⁸ Data yang diperoleh dari Flower Aceh tentang Perempuan yang Mencalonkan Diri, 2024

2. Perempuan Yang Terpilih

Flower Aceh mendampingi perempuan yang telah terpilih menjadi anggota DPRD atau lembaga legislatif lainnya. Dukungan ini mencakup bimbingan dalam pembuatan kebijakan, pembangunan jaringan politik, serta strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas legislatif.

49

Flower Aceh memberikan pendampingan kepada perempuan yang telah terpilih menjadi anggota DPRD atau lembaga legislatif lainnya. Dukungan ini meliputi Bimbingan dalam Pembuatan Kebijakan Flower Aceh membantu anggota legislatif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan panduan tentang analisis kebijakan, penyusunan rancangan undang-undang, dan evaluasi dampak kebijakan.⁵⁰

Pembangunan Jaringan Politik Mereka menyediakan dukungan dalam pembangunan jaringan politik yang efektif, termasuk pengembangan hubungan dengan rekan legislatif, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi kolaborasi dan advokasi yang lebih baik. Strategi Menghadapi Tantangan Flower Aceh memberikan strategi dan bimbingan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas legislatif, termasuk penanganan konflik, permasalahan administratif, dan strategi untuk mempengaruhi kebijakan secara efektif.⁵¹

⁴⁹ Data yang diperoleh dari Flower Aceh tentang perempuan yang terpilih, 2024

⁵⁰ Sari, M. (2022). *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Periode 2019-2024 Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Kasus Minimnya Kemenangan Perempuan Di Kursi DPRK)* (UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan).

⁵¹ Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.

Flower Aceh melaksanakan pendampingan dengan tujuan utama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui berbagai pendekatan strategis. Pendampingan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan dengan menyediakan pelatihan, mentoring, dan dukungan praktis. Ini meliputi pengembangan keterampilan dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye, serta strategi komunikasi yang efektif. Flower Aceh juga mendukung calon perempuan dalam pembuatan strategi kampanye, penggalangan dana, dan komunikasi dengan pemilih untuk memastikan bahwa calon perempuan dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemilihan.⁵²

Selain itu, Flower Aceh berupaya memperluas jaringan politik perempuan dengan memfasilitasi koneksi dan kolaborasi dengan tokoh politik, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Dukungan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang mendukung agenda kebijakan perempuan dan memperkuat pengaruh mereka dalam proses pembuatan keputusan. Flower Aceh juga memberikan bimbingan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama masa jabatan legislatif, seperti penanganan konflik dan permasalahan administratif. Dengan pendekatan menyeluruh ini, Flower Aceh berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dalam politik, memastikan mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tugas legislatif secara efektif.⁵³

Flower Aceh melaksanakan pendampingan sebagai bagian dari agenda strategis mereka untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga

⁵²Flower Aceh <https://www.floweraceh.or.id/riswati-beri-ruang-yang-adil-bagi-perempuan-dalam-demokrasi-di-aceh/> di akses pada tanggal 10 bulan 01 tahun 2025

⁵³Lockley, A., & Brown, G. Pengalaman Dan Pembelajaran Dari Para Mitra Mampu.

legislatif dan politik. Dukungan ini ditujukan untuk memperbaiki keseimbangan gender di posisi pengambilan keputusan dengan memberikan bantuan kepada perempuan yang mencalonkan diri atau telah terpilih, guna memastikan bahwa suara perempuan lebih terdengar dalam proses pembuatan kebijakan.

Pendampingan ini juga berorientasi pada pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka melalui pelatihan dan bimbingan. Flower Aceh berkomitmen untuk membantu perempuan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran legislatif secara efektif, termasuk dalam hal perencanaan kampanye, pembuatan kebijakan, dan strategi komunikasi.⁵⁴

Selain itu, Flower Aceh berperan dalam mendukung agenda kebijakan perempuan dan memperluas pengaruh mereka. Dengan pendekatan menyeluruh ini, Flower Aceh bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi anggota legislatif perempuan dan memastikan bahwa pendampingan yang diberikan sejalan dengan misi organisasi dalam mencapai keseimbangan gender yang lebih baik serta kontribusi yang signifikan dalam pembuatan kebijakan. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Riswati sebagai Direktur Eksekutif Flower Aceh,

Di bentuknya kelompok dampingan bagi kaum perempuan oleh Flower Aceh untuk perempuan agar dapat berkumpul dalam suatu wadah sehingga Flower Aceh dapat membantu kaum perempuan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁵⁵

⁵⁴ Data yang diperoleh dari Flower Aceh tentang perempuan yang terpilih, 2024

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Riswati, sebagai Direktur Flower Aceh, pada tanggal 01 Juli 2024, di kantor Flower Aceh.

4.2.1. Peran Pendidikan Politik dan Dukungan Untuk Perempuan

Peran pendidikan politik yang dimaksud oleh Flower Aceh merujuk pada serangkaian upaya sistematis yang dirancang untuk mengedukasi dan memberdayakan perempuan agar dapat terlibat secara efektif dan berpengaruh dalam ranah politik. Flower Aceh membentuk pendidikan politik sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan representasi perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Tujuan utama dari pendidikan politik dalam konteks keterwakilan perempuan adalah untuk mendongkrak atau meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Flower Aceh telah meluncurkan serangkaian program pendidikan politik dengan tujuan utama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Program-program tersebut meliputi Program Sekolah Perempuan (2016), Program Pemimpin Perempuan Muda (2018), Program Pendidikan Politik untuk Komunitas (2019), Program Penguatan Kebijakan Gender (2020), dan Program Pemberdayaan Politisi Perempuan (2021). Setiap program dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan praktis, mulai dari pelatihan kepemimpinan hingga advokasi kebijakan. Dengan adanya Program ini Flower Aceh berupaya untuk menjangkau seluruh wilayah Aceh dengan memastikan bahwa program-program ini dapat diakses oleh perempuan dari berbagai latar belakang dan lokasi, baik di perkotaan maupun pedesaan.⁵⁶

Untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik dalam hal meningkatkan politik terhadap perempuan, pendidikan sangat diperlukan. Hal

⁵⁶ Flower Aceh <https://www.floweraceh.or.id/> Di akses di akses pada tanggal 10 bulan 1 tahun 2025

inilah yang kemudian dilakukan oleh lembaga Flower dengan memberikan pendidikan pada kelompok perempuan, seperti yang disampaikan oleh ibu Riswati sebagai Direktur Flower Aceh.

*“Membicarakan tentang keterwakilan perempuan dalam politik, pendidikan bagi perempuan sangat diperlukan. Flower mencoba mengisi penguatan-penguatan perempuan sebagai masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan informal sehingga dapat memperkuat mereka dan bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, berkontribusi untuk dapat mengembangkan kehidupan masyarakat yang lain agar lebih baik”.*⁵⁷

Pendidikan bagi perempuan sangat penting dalam konteks peningkatan keterwakilan mereka dalam politik dan penguatan masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya menyediakan pengetahuan dasar, tetapi juga keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial.

Inisiatif seperti Flower memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan informal yang dapat memberdayakan perempuan. Melalui program-program pendidikan informal, perempuan diberikan kesempatan untuk mempelajari hak-hak mereka, mekanisme pengambilan keputusan, serta keterampilan kepemimpinan dan advokasi.

Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang dilakukan oleh Flower Aceh, juga di ungkapkan oleh Staff Flower Aceh ibu Fatimah Zuhra ia mengatakan.

“Kalau Flower sendiri dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dapat dilihat bahwa perempuan lebih mandiri, baik secara kapasitas,

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Riswati, sebagai Direktur Flower Aceh, pada tanggal 01 Juli 2024, di kantor Flower Aceh.

*dan dia dihargai hak-haknya sebagai perempuan, pemenuhan hak-hak dasar untuk perempuan. Menjadi mandiri secara kapasitas artinya mempunyai pendidikan yang baik, informasi yang baik dan mereka dapat melakukannya dengan cara mereka sendiri”.*⁵⁸

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik, Flower Aceh memberikan pendidikan-pendidikan terhadap perempuan agar perempuan menjadi lebih baik, baik secara kapasitas, sumber daya, dan lain sebagainya khususnya di ranah politik. Hal tersebut dikarenakan keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu civil society. Oleh karena itu, Flower Aceh yang mengkonsentrasikan diri pada perempuan berusaha meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Gebrina Rezeki, Sebagai Wakil Kepala Sekolah Ham Perempuan dan Staff Program Flower Aceh

*“ada beberapa strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Bentuk kegiatannya beragam ada yang bentuk diskusi, penguatan kapasitas untuk kelompok perempuan dengan melakukan aksi-aksi bersama, pendidikan kritis untuk kelompok perempuan di akar rumput, forum ini menjadi wadah untuk memberikan pendidikan bagi perempuan. Flower Aceh melakukan pendidikan penyadaran isu-isu yang ada di masyarakat tentang kesetaraan gender. Menjelang pemilu juga diberikan penguatan-penguatan tentang politik bagaimana kita dapat terlibat dalam demokrasi”.*⁵⁹

Dalam hal meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik Flower memberikan dukungan terhadap perempuan yang ingin mengikuti pencalonan calon legislatif. Dukungan ini mencakup berbagai bentuk bantuan yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan dalam proses pencalonan mereka.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu Fatimah Zuhra, Sebagai Staff Flower Aceh, pada tanggal 12 Juli 2024, di Sei Hotel Banda Aceh.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Gebrina Rezeki, Sebagai Wakil Kepala Sekolah Ham Perempuan dan Staff Program Flower Aceh, pada tanggal 15 Juli 2024, di kantor Flower Aceh.

Seperti yang di jelaskan oleh ibu Faizah dari partai persatuan pembangunan yang pernah menjadi caleg pada pemilu 2019.

“Flower Aceh mendukung penuh perempuan-perempuan yang ingin terlibat dalam politik, contohnya seperti caleg perempuan setiap ada kegiatan flower selalu menghadirkan caleg-caleg tersebut supaya bisa dikenal oleh publik, dan juga flower banyak memberi saran-saran kepada caleg perempuan ketika tampil membawa isu-isu tentang perempuan. Flower Aceh berkerja sama dengan salah satu lembaga yang membahas politik perempuan indonesia (IRI), dan ada juga berkerja sama dengan kaukus perempuan politik indonesia (KPPI), untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk tampil sebagai caleg perempuan di politik.”⁶⁰

4.2.2 Peran Pelatihan/Training

Dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik serta memperkuat kapasitas politik perempuan, Flower Aceh menyelenggarakan berbagai pelatihan yang dirancang untuk memberdayakan perempuan secara komprehensif. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek penting yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan politik perempuan.

Flower Aceh memberikan pelatihan strategis dengan tujuan mempersiapkan perempuan untuk merencanakan dan melaksanakan kampanye politik secara efektif. Pelatihan ini mencakup pembuatan rencana kampanye, pengelolaan tim, serta teknik komunikasi dan pemasaran politik. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengelola kampanye mereka dengan efisien yang diinginkan. Seperti yang di jelaskan oleh ibu Sitty Almatunira, Sebagai Staff data Flower Aceh.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Faizah, sebagai Caleg perempuan dari partai persatuan pembangunan, pada tanggal 18 Juli 2024, di Hope Cafe Ajun.

*Flower Aceh melakukan penguatan dalam bentuk pelatihan pelatihan untuk perempuan dalam memaksimalkan perannya. Flower Aceh memberikan pelatihan pendidikan kritis untuk kelompok perempuan di akar rumput, dengan adanya pendidikan kritis tersebut bukan hanya menjadi ruang diskusi tetapi sport sistem bagi kelompok perempuan di akar rumput dengan mendiskusikan isu-isu yang ada di masyarakat. Flower Aceh juga mendorong dan mendukung mereka untuk terlibat dalam ranah politik.*⁶¹

Inisiatif Flower Aceh dalam menyediakan pelatihan yang komprehensif serta dukungan berkelanjutan bagi perempuan di tingkat akar rumput sangat penting dalam menciptakan perubahan politik yang lebih inklusif dan representatif. Program ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kapasitas kepemimpinan perempuan, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan efektif dalam arena politik Program-program yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam ranah politik tetapi juga untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih mendalam Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Gebrina Rezeki, Sebagai Wakil Kepala Sekolah Ham Perempuan dan Staff Program Flower Aceh.

*“Dengan adanya flower aceh dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik merupakan langkah yang signifikan dan strategis, Melalui program-program ini, berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam ranah politik dapat diatasi dengan lebih efektif. upaya Flower Aceh dalam melatih perempuan untuk berperan aktif dalam politik tidak hanya membangun kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dan lebih dinamis yang mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan”.*⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sitty Almatunira, Sebagai Staff data Flower Aceh, Pada tanggal 15 Juli 2024, di kantor Flower Aceh.

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Hasil wawancara dengan Ibu Gebrina Rezeki, Sebagai Wakil Kepala Sekolah Ham Perempuan dan Staff Program Flower Aceh, pada tanggal 15 Juli 2024, di kantor Flower Aceh.

4.2.3 Peran Advokasi

Dalam konteks keterwakilan perempuan dalam politik, advokasi yang dilakukan oleh Flower Aceh mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memajukan peran serta keterlibatan perempuan di ranah politik. Flower Aceh, sebagai organisasi yang fokus pada isu gender dan hak-hak perempuan di Aceh, menjalankan advokasi ini dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis.

Advokasi ini dimulai dengan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Kegiatan ini melibatkan edukasi publik tentang manfaat dan kebutuhan akan keberagaman gender dalam proses pengambilan keputusan politik. Tanpa pemahaman ini, sulit bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk mengakui dan mendukung perubahan yang diperlukan.

Kampanye dan publikasi juga merupakan aspek integral dari advokasi ini. Flower Aceh menyelenggarakan berbagai kampanye untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik terkait keterwakilan perempuan, seperti ketidaksetaraan akses atau kekurangan representasi. Melalui media, acara publik, dan kegiatan lainnya, mereka berusaha untuk membangun dukungan masyarakat dan mendorong perubahan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatimah Zuhra, Sebagai Staff Program Flower Aceh.

“Flower Aceh melakukan advokasi-advokasi seperti kampanye mendukung kepemimpinan perempuan merupakan sebuah langkah penting dalam menggalang dukungan serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam

*politik dan publik. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan menghapus hambatan-hambatan yang menghalangi perempuan untuk berperan aktif dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Kampanye-kampanye ini juga memberikan platform bagi perempuan untuk memperkuat suara mereka dalam masyarakat, mendorong lebih banyak perempuan untuk maju dalam bidang politik, dan pertemuan komunitas untuk membangun kapasitas dan solidaritas di antara perempuan Aceh, serta untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam politik”.*⁶³

4.3 Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Flower Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Dalam menjalankan tugas dan peran tentunya tidak semua seperti yang diharapkan. Tentunya ada tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perannya. Begitu pula dengan Flower Aceh sebagai lembaga pemerhati perempuan yang menjalankan perannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi oleh Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Flower Aceh juga sering menghadapi hambatan yang berkaitan dengan stereotip gender dan diskriminasi yang masih kuat dalam masyarakat. Pandangan tradisional dan norma-norma sosial mengenai peran gender dapat menghambat partisipasi perempuan dalam politik dan mengurangi peluang mereka untuk berkembang dalam arena tersebut. Diskriminasi yang bersifat sistemik ini mempengaruhi kesempatan perempuan untuk berperan aktif dan mendapatkan pengakuan yang layak di bidang politik.

Selain itu, Flower Aceh kadang mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan yang memadai dari berbagai pihak terkait. Kurangnya dukungan dari

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Zuhra, Sebagai Staff Program Flower Aceh, pada tanggal 12 Juli 2024, di Sei Hotel Banda Aceh.

lembaga pemerintah, partai politik, atau donor dapat menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program. Dukungan eksternal sangat penting untuk keberhasilan berbagai inisiatif, dan tanpa adanya kontribusi dari pihak-pihak tersebut, Flower Aceh mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan program-programnya secara optimal.

4.3.1 Budaya Patriarki

Budaya patriarki masih sangat mendalam dan melekat dalam struktur masyarakat, dan hal ini menjadi salah satu tantangan utama bagi Flower Aceh dalam upayanya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Budaya patriarki, yang telah mengakar dalam tradisi dan norma sosial, terus mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Keterikatan terhadap nilai-nilai patriarki ini seringkali menghambat kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik.⁶⁴

Dalam konteks ini, budaya patriarki sebagai kendala signifikan bagi Flower Aceh. Masyarakat yang masih sangat terikat pada norma-norma patriarki seringkali membatasi ruang gerak perempuan dan mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang. Perempuan yang terpengaruh oleh budaya ini mungkin merasa tertekan atau kurang percaya diri untuk keluar dari zona nyaman mereka, yang pada gilirannya berdampak negatif pada partisipasi mereka dalam politik dan kegiatan publik lainnya. Budaya patriarki masih sangat mendalam dan melekat dalam struktur masyarakat, dan hal ini menjadi salah satu tantangan utama bagi

⁶⁴ Data yang di peroleh dari Flower Aceh tentang budaya patriarki, 2024

Flower Aceh dalam upayanya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Budaya patriarki, yang telah mengakar dalam tradisi dan norma sosial, terus mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran perempuan. Keterikatan terhadap nilai-nilai patriarki ini seringkali menghambat kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik.

Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks budaya. Flower Aceh perlu bekerja untuk mengubah pandangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender serta keterlibatan perempuan dalam politik. Selain itu, penting bagi Flower Aceh untuk memberikan dukungan yang kuat kepada perempuan guna meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian mereka, serta mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh norma-norma patriarki. Dengan demikian, Flower Aceh dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan mendukung perempuan dalam mengambil peran yang lebih aktif di masyarakat. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Riswati sebagai Direktur Eksekutif Flower Aceh,

*“Kendala utamanya adalah budaya patriaki yang masih kental dianut oleh masyarakat, yang dapat mengurangi ruang gerak perempuan, Budaya yang menganggap rendah peran perempuan dalam ruang publik dan politik menyebabkan ketidakberanian di kalangan perempuan untuk mengambil peran aktif, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Flower Aceh”.*⁶⁵

4.3.2 Kurangnya Kesadaran

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Riswati, sebagai Direktur Eksekutif Flower Aceh, Pada tanggal 01 Juli 2024, di Kantor Flower Aceh.

Dalam upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, pendidikan yang memadai memiliki peran yang sangat penting. Namun, terdapat pandangan di kalangan sebagian perempuan yang meragukan relevansi pendidikan politik bagi mereka. Beberapa perempuan masih beranggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan tidaklah terlalu penting, dengan asumsi bahwa banyak laki-laki sudah mampu berkiprah di ranah tersebut. Pandangan ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses politik dan pembuatan kebijakan.⁶⁶

Perempuan masih ada yang menganggap bahwa pendidikan yang arahnya ke politik tidak terlalu penting. Karena masih ada para lelaki yang mampu untuk terjun ke ranah perpolitikan dan pemerintahan. Sehingga jika ada pelatihan-pelatihan serta pendidikan seperti politik kritis bagi perempuan di akar rumput, peningkatan kapasitas dan lain-lain, perempuan kurang antusias, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kasmawati, sebagai caleg 2024 dari partai persatuan pembangunan.

*“sejumlah perempuan merasa bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam politik, karena menganggap bahwa peran tersebut sudah cukup diwakili oleh laki-laki. Pandangan ini sering kali menyebabkan rendahnya antusias perempuan terhadap pelatihan dan pendidikan politik yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Beliau juga menambahkan bahwa kurangnya antusias ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan”.*⁶⁷

4.3.3 Kurangnya Dukungan

⁶⁶ Data yang di peroleh dari Flower Aceh tentang kurangnya kesadaran politik perempuan, 2024.

⁶⁷ Hasil wawancara Ibu Kasmawati, sebagai caleg 2024 dari partai persatuan pembangunan wawancara 19 Juli 2024.

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, Flower Aceh menghadapi tantangan besar dalam hal dukungan dari berbagai pihak. Dukungan eksternal, baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, maupun donor internasional, sangat krusial untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang bertujuan memajukan keterwakilan perempuan. Namun, Flower Aceh sering kali menemukan kendala, terutama dari kelompok-kelompok konservatif yang merasa bahwa isu-isu gender bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan ajaran agama mereka. Pandangan ini menciptakan ketidakpahaman dan penolakan terhadap program-program yang ditawarkan oleh lembaga ini.

Resistensi terhadap Flower Aceh juga muncul dari pihak-pihak religius yang menganggap pembahasan isu gender sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Di daerah dengan latar belakang religius yang kuat, seperti di Aceh, upaya untuk mempromosikan keterlibatan perempuan dalam politik sering kali dianggap melanggar ajaran syariat atau nilai-nilai religius yang mereka anut. Kecurigaan terhadap agenda LSM ini menghambat dukungan dari kelompok religius dan dapat menyebabkan penolakan atau penghindaran terhadap program-program yang dirancang untuk memberdayakan perempuan dalam ranah politik.

Di tingkat lokal, Flower Aceh menghadapi tantangan tambahan dari pemangku kepentingan yang mungkin tidak memahami atau menyetujui peran perempuan dalam politik. Beberapa tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan lokal khawatir bahwa peningkatan keterwakilan perempuan dapat mengubah struktur

sosial yang ada, atau mereka mungkin tidak menyadari manfaat positif dari keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Kurangnya dukungan ini sering kali disebabkan oleh ketidakpahaman atau kekhawatiran terhadap perubahan sosial yang dapat diakibatkan oleh program-program Flower Aceh. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi Flower Aceh untuk terus melakukan dialog, menjelaskan manfaat keterlibatan perempuan, dan mencari dukungan dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan religius.⁶⁸

Namun tidak semua pihak mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Flower Aceh. Lembaga Flower Aceh dianggap membawa aliran liberal kerana mengangkat dan membicarakan isu gender. Hal ini yang kemudian munculnya kecurigaan terhadap lembaga ini, seperti yang di sampaikan oleh Ibu Fatimah Zuhra, Sebagai Staff Program Flower Aceh.

*“Kendala yang kami hadapi mencakup berbagai tantangan, salah satunya adalah adanya pihak-pihak yang tidak memberikan dukungan terhadap inisiatif kami. Selain itu, kami juga pernah mengalami situasi di mana timbul kecurigaan dari pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman dengan aktivitas kami. Salah satu isu utama adalah ketika kami membahas atau memperjuangkan isu gender. Dalam konteks ini, beberapa pihak menganggap bahwa pembahasan isu gender yang kami lakukan dianggap tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pandangan ini sering kali menciptakan resistensi dan hambatan dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, karena dianggap tidak selaras dengan norma-norma atau ajaran agama yang berlaku di masyarakat”.*⁶⁹

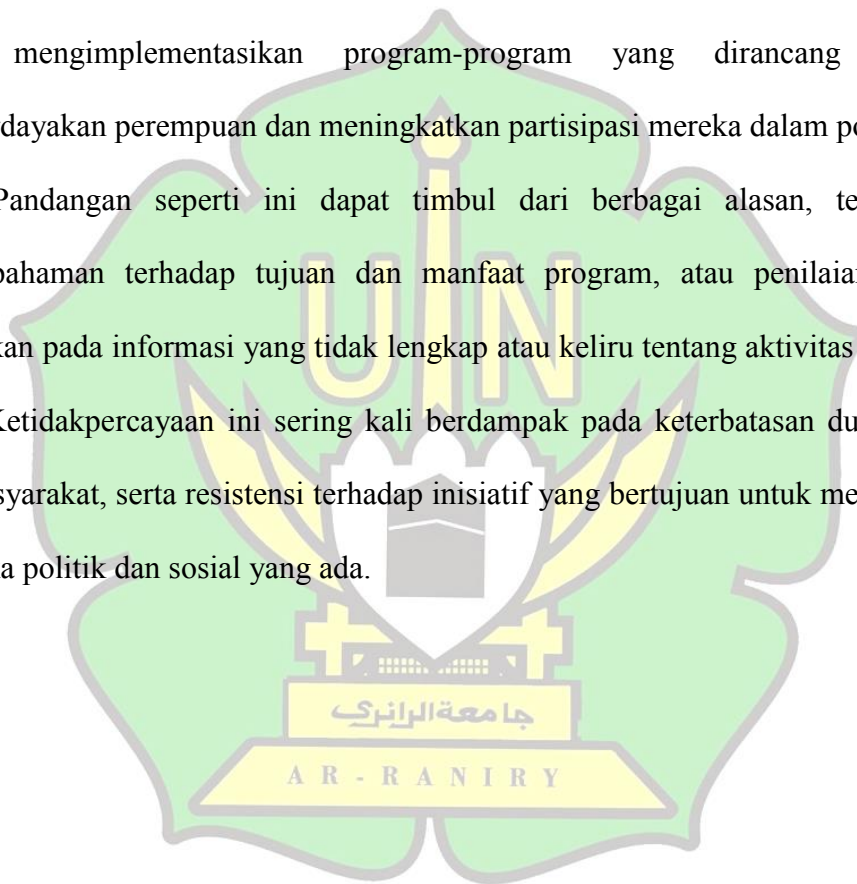
Selanjutnya, Flower Aceh menghadapi kendala signifikan dalam upayanya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, salah satunya adalah

⁶⁸ Data yang diperoleh dari Flower Aceh tentang kurangnya dukungan kepada perempuan, 2024

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Zuhra, Sebagai Staff Program Flower Aceh, pada tanggal 12 Juli 2024, di Sei Hotel Banda Aceh.

pandangan skeptis dari sebagian masyarakat terhadap lembaga ini. Beberapa elemen masyarakat memandang Flower Aceh secara sepihak atau kurang mendalam, sehingga hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memajukan keterwakilan perempuan. Ketidakpercayaan atau pandangan sebelah mata terhadap lembaga ini menyulitkan upaya Flower Aceh dalam mengimplementasikan program-program yang dirancang untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam politik.

Pandangan seperti ini dapat timbul dari berbagai alasan, termasuk ketidakpahaman terhadap tujuan dan manfaat program, atau penilaian yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau keliru tentang aktivitas Flower Aceh. Ketidakpercayaan ini sering kali berdampak pada keterbatasan dukungan dari masyarakat, serta resistensi terhadap inisiatif yang bertujuan untuk mengubah dinamika politik dan sosial yang ada.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lakukan dengan 4 peranan, yaitu peran pendampingan, peran pendidikan politik dan dukungan untuk perempuan, peran pelatihan\training, dan yang terakhir peran advokasi.
2. hambatan yang dihadapi Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, budaya patriaki yang masih melekat di tengah-tengah masyarakat, kurangnya kesadaran kelompok perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas, serta kurangnya dukungan dari masyarakat atau pihak lain terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Flower Aceh dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

5.2 Saran

1. Diharapkan Flower Aceh mampu memaksimalkan perannya sebagai LSM yang berfokus pada isu-isu perempuan dalam meningkatkan keterwakilan

perempuan dalam politik, agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses politik.

2. Di harapkan kepada masyarakat agar dapat terlibat lebih aktif dalam program-program yang di buat oleh Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil judul Evaluasi Keberhasilan Program-Program Flower Aceh: Studi tentang Dampak, Efektivitas, dan Capaian Inisiatif Lembaga dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006).
- Djam'am Satori ,dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Haris Herdyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salmba Humanika, 2010).
- Solihah, R., & IP, S. (2019). *Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah. Pengantar Ilmu Pemerintahan*.
- Lapian, L. G. (2012). *Disiplin hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasehudi Toto Syatori dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Putra, D. K. S. (2018). *Political social responsibility: Dinamika komunikasi politik dialogis*. Prenada Media
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Solihah, R., & IP, S. (2019). *Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah. Pengantar Ilmu Pemerintahan*.
- Sugiono , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, :Alfabeta,2010).
- Sugiyono,*metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung

JURNAL

- Astuti, P. (2015). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3).

- Ekawati, E. (2015). Penerapan Kebijakan Afirmasi Dan Pola Rekrutemen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2009. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*.
- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*.
- Pinilas, R., Gosal, R., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*.
- Puspitasari, T. F. (2018). Gerakan Afirmasi Untuk Kesetaraan: Kuota 30%, Peran DPIA dan Representasi Perempuan Aceh di Parlemen. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Sahi, N. A. (2012). Studi partisipasi politik perempuan kabupaten gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Nurcahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. Agastya: *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*.
- SKRIPSI**
- Aulia, T. F. (2023). *Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Damayanti, T. (2021). *Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRD) Pada Tahun 2019-2024)* (Doctoral dissertation, UPT. PERPUSTAKAAN).
- Intan Julia. *Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekekrasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Katresna, W. (2019). *Visualisasi Wanita Dalam Kampanye Politik (Studi Kasus pada Srikanthi Muda HY di PILKADA Kabupaten Ciamis tahun 2018)*.
- Puspitasari, T. F. (2018). *Gerakan Afirmasi Untuk Kesetaraan: Kuota 30%, Peran DPIA dan Representasi Perempuan Aceh di Parlemen*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Rosni, R. (2021). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Suwarni, M. (2023). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Riswati, sebagai Direktur Eksekutif Flower Aceh, Pada tanggal 01 Juli 2024, di Kantor Flower Aceh.

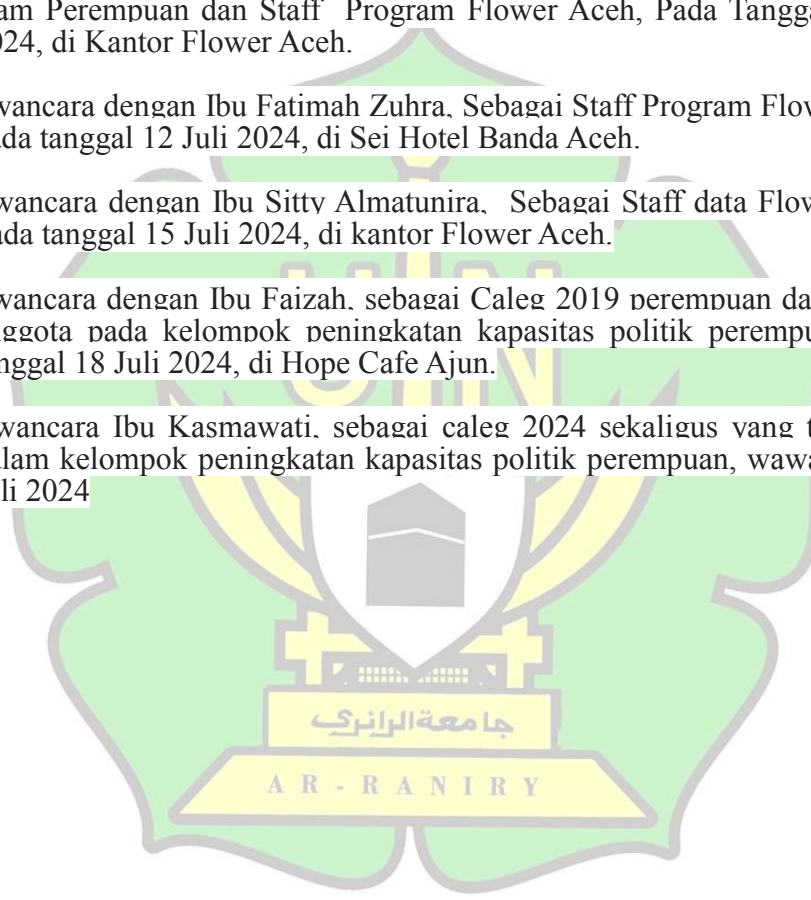
Hasil wawancara dengan oleh Ibu Gebrina Rezeki, Sebagai Wakil Kepala Sekolah Ham Perempuan dan Staff Program Flower Aceh, Pada Tanggal 15 Juli 2024, di Kantor Flower Aceh.

Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah Zuhra, Sebagai Staff Program Flower Aceh, pada tanggal 12 Juli 2024, di Sei Hotel Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Ibu Sitty Almatunira, Sebagai Staff data Flower Aceh, Pada tanggal 15 Juli 2024, di kantor Flower Aceh.

Hasil wawancara dengan Ibu Faizah, sebagai Caleg 2019 perempuan dan sebagai anggota pada kelompok peningkatan kapasitas politik perempuan, pada tanggal 18 Juli 2024, di Hope Cafe Ajun.

Hasil wawancara Ibu Kasmawati, sebagai caleg 2024 sekaligus yang tergabung dalam kelompok peningkatan kapasitas politik perempuan, wawancara 19 Juli 2024



Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian

1. Kapan Flower Aceh didirikan atau terbentuk?
 2. Bagaimana latar belakang terbentuknya Flower Aceh?
 3. Bagaimana Flower Aceh menilai keterwakilan perempuan dalam politik saat ini?
 4. Bagaimana peran Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik?
 5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik?
 6. Program apakah yang sudah dilaksanakan atau yang sedang di upayakan oleh Flower Aceh untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik?
 7. Bagaimana Flower Aceh mengukur keberhasilan atau kemajuan dalam upaya Flower meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik?
 8. Apakah Flower Aceh ada berkerjasama dengan pemerintah atau lembaga lainnya dalam mendukung keterwakilan perempuan dalam politik?
 9. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Flower Aceh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik?
 10. Apa harapan Flower Aceh untuk masa yang akan datang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik?
- Pertanyaan Untuk Caleg
1. Bagaimana menurut anda tingkat keterwakilan perempuan dalam politik saat ini?
 2. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi rendah atau tingginya keterwakilan perempuan dalam politik?
 3. Bagaimana anda melihat peran Flower Aceh dalam mendukung perempuan untuk terlibat aktif dalam politik?
 4. Bagaimana Flower Aceh membantu dalam membangun kesadaran politik di kalangan perempuan?
 5. Apa harapan anda terhadap dukungan Flower Aceh dalam mendukung keterwakilan perempuan dalam politik?

Lampiran 2. Surat penelitian

6/24/24, 9:27 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-949/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
LSM Flower Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ILDA LATIFA / 200801031**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Perumahan Indiser tanjung Selamat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Flower Aceh Dalam Meningkatkan keterwakilan Perempuan Dalam Politik**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

AR - RANIRY



Berlaku sampai : 27 November 2024

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Direktur Eksekutif Flower Aceh



Wawancara bersama Staff Program Flower Aceh



Wawancara bersama Staff Data Flower Aceh



Wawancara bersama Wakil Kepala sekolah Ham dan Staff Program Flower Aceh



Wawancara bersama caleg perempuan dari partai persatuan pembangunan yang



Wawancara bersama caleg perempuan dari partai persatuan pembangunan yang didukung oleh Flower Aceh